

**FAKTOR PENGHAMBAT PROGRAM GERAKAN
PANGAN MURAH OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA**

Muhammad Ardi, Kus Indarto

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 4, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Program Gerakan Pangan Murah Oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

Pengarang : Muhammad Ardi

NIM : 2102016030

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 27 Desember 2025

Pembimbing,



**Dr. Kus Indarto, M.A.P.
NIP 199208192025062004**

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik

Volume : 13

Nomor : 4

Tahun : 2025

Halaman : 1019-1029

FAKTOR PENGHAMBAT PROGRAM GERAKAN PANGAN MURAH OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SAMARINDA

Muhammad Ardi¹, Kus Indarto²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan faktor penghambat program Gerakan Pangan Murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus terhadap faktor penghambat program GPM yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Sumber data penelitian yaitu data primer melalui wawancara bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda dan Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan serta data sekunder berupa laporan GPM Kota Samarinda dan laporan pendukung yang kredibel. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat program GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, yaitu ketergantungan pasokan terhadap mitra vendor yang berdampak pada kemandirian organisasi dalam menyediakan suplai pasokan secara masif. Ketiadaan forum komunikasi dengan berbagai pihak khususnya mitra GPM sehingga membatasi keterlibatan mitra GPM dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program GPM. Minimnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda belum menjangkau secara menyeluruh terhadap kelompok sasaran sehingga pelaksanaan program GPM menjadi kurang optimal.

Kata Kunci : Program GPM, Ketahanan Pangan, Inflasi Daerah

Pendahuluan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer yang vital bagi manusia untuk dapat bertahan hidup sehari-hari (Fauzia dkk., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menekankan bahwa kebutuhan pangan menjadi penting untuk dipenuhi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini dimaksudkan agar sistem penyelenggaraan pangan dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhardji2608@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

kebutuhan masyarakat secara optimal berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan (Indarto, 2020).

Salah satu penyelenggaraan pangan yaitu ketahanan pangan menjadi topik krusial untuk dipenuhi dalam rangka menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan nasional (Albertus, 2022). Peningkatan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dikarenakan permasalahan pengelolaan ketahanan pangan berdampak kompleks jika tidak ditangani dengan baik. Karena kekurangan pangan akan menyebabkan dampak yang buruk pada kesehatan sehingga penting untuk mempersiapkan pangan sebagai penopang kesehatan masyarakat (Sari dkk., 2022).

Sebagai kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah stabilitas pasokan dan harga pangan diiringi dengan kebutuhan pangan yang memadai (Harnanda, 2020; Ramadhan dkk., 2021). Pemerintah dituntut agar dapat menetapkan program-program ketahanan pangan dengan perencanaan kebijakan yang mengarahkan pada keterlibatan aktif pemerintah dan seluruh elemen sehingga membentuk suatu sistem ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan (Yulianti dkk., 2023). Salah satu perhatian tata kelola dalam penyelenggaraan ketahanan pangan adalah inflasi yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan serta berimplikasi pada kondisi krisis pangan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat inflasi di Kaltim mengalami penurunan antara tahun 2022 dan 2023 (BPS, 2024). Pada tahun 2022, tercatat inflasi di Kaltim melonjak tajam senilai 5,35%. Hal ini dipicu karena tingginya harga bahan makanan serta dampak dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang meningkatkan permintaan sangat mempengaruhi stabilitas pangan. Kemudian pada tahun 2023, inflasi mengalami penurunan senilai 3,46%. Kelompok pengeluaran yang paling berkontribusi terhadap inflasi di Kaltim adalah makanan dan minuman, kemudian disusul transportasi (Intoniswan, 2024). Oleh sebab itu, perlu adanya upaya perencanaan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup sebagai unsur penting dalam mendukung ketahanan pangan di daerah Kaltim (Ramadhan dkk., 2021).

Kota Samarinda mengalami kenaikan pada tahun 2023 mencapai 88,97 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 84,66 (BPN, 2024). Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Timur sekaligus pioner dalam arah kebijakan ketahanan pangan. Kota Samarinda menjadi kota dengan populasi penduduk tertinggi sebanyak 861.878 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,43% di Pulau Kalimantan (BPS, 2024). Hal tersebut mendorong penjaminan atas stabilitas pasokan dan harga pangan pokok setiap tahunnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai pertanda bahwa telah terjadi inflasi pada komoditas tersebut. Tercatat pada tahun 2023 Kota Samarinda mengalami

inflasi sebesar 3,37% dengan IHK sebesar 115,76 yang menempatkan Kota Samarinda berada pada urutan ke tiga dari dua belas kota IHK se-Kalimantan (BPS, 2023). Hadirnya IHK dan inflasi yang berjalan beriringan menjadi sebuah indikator dalam melihat faktor pemicu dan penghambat pergerakan ekonomi suatu daerah khususnya stabilitas pasokan dan harga pangan pokok (BPS, 2023). Hal ini tentu memerlukan dukungan kebijakan pemerintah Kota Samarinda dalam merespon adanya inflasi pangan yang terjadi dengan kebijakan ketahanan pangan di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Ketahanan Pangan dan Gizi pada Bab 2 bagian kesepuluh Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Pasal 22 ayat (1) menekankan pentingnya peningkatan ketahanan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menghadapi stabilitas pangan yang mempengaruhi ketersediaan dan akses pangan. Salah satu strategi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda yaitu dengan Program Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Samarinda.

Program GPM merupakan instrumen dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat. Program GPM ini digaungkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama pemerintah daerah bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Pelaksanaan program GPM berawal pada tahun 2018 di Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagai *leading sector* (Paturusi, 2019). Program GPM telah berlangsung hingga sekarang dengan frekuensi pelaksanaan kurang lebih 12 kali dalam setahun berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan GPM. Adapun tim yang bertugas dalam pelaksanaan GPM yakni tim GPM yang mengatur teknis pelaksanaan program serta bekerjasama dengan mitra GPM dalam menerima fasilitas distribusi pangan pada program GPM.

Namun dalam pelaksanaannya, program GPM di Kota Samarinda belum berjalan secara optimal dalam menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Adapun kendala yang dialami dalam implementasi program GPM, meliputi: 1) Ketergantungan tinggi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh vendor mitra GPM; 2) Tidak adanya forum komunikasi khusus yang berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat; dan 3) Minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor penghambat program GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Wahab (2022) menyatakan bahwa kebijakan merupakan tindakan terencana pemerintah untuk mewujudkan ekspektasi publik. Sejalan dengan Suaib (2016) menjelaskan bahwa kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat idealnya digagas oleh lembaga kekuasaan politik yang mendapatkan kepercayaan masyarakat, umumnya melalui mekanisme pemilihan untuk mewakili aspirasi rakyat. Tjilen (2019) menuturkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diakui secara hukum dan sah, mengingat proses perumusannya dilakukan oleh institusi yang berwenang dalam struktur pemerintahan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik sebagai segala proses kegiatan yang dinyatakan untuk dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan negara agar dapat mencapai tujuan kehidupan bangsa negara. Kebijakan publik menjadi kekuatan utama dari pemerintah dalam menjawab permasalahan publik sehingga praktik yang dihasilkan harus didasarkan pada perencanaan yang matang.

Program

Septiana dkk. (2023) menyatakan bahwa program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Sejalan dengan pendapat Korten (dalam Alaslan, 2021) mengemukakan bahwa program adalah langkah pertama yang krusial dalam proses implementasi. Jones (dalam Andani dkk., 2019) menjelaskan bahwa program menjadi komponen utama dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Faktor penting lainnya dalam proses pelaksanaan program adalah adanya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang menjadi target, dengan harapan program tersebut memberikan kontribusi positif berupa transformasi dan peningkatan taraf hidup. Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dirancang untuk mencapai tujuan yang spesifik. Program juga memerlukan sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun material.

Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan tertuang bahwa ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi individu dalam negara untuk memiliki pangan yang cukup, yang dinyatakan dalam ketersediaan pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, serbaguna, bergizi, adil, dan terjangkau serta tetap memperhatikan norma-norma agama, kepercayaan, dan budaya dalam mewujudkan kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkesinambungan. Fauzi dkk. (2019) menyatakan bahwa ketahanan pangan atau food security didefinisikan menjadi suatu kondisi dimana setiap individu memiliki akses secara fisik dan ekonomi untuk mendapatkan pangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan untuk terus hidup sehat. Firdaus (2020) menuturkan bahwa ketahanan pangan sebagai keadaan dimana

terpenuhinya pangan seluruh masyarakat di suatu negara yang ditandai dengan ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi kualitas, kuantitas, kandungan gizi dan segi keamanan pangan untuk dikonsumsi. Sejalan dengan Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat tidak berada dalam keadaan kekurangan atau dihantui ancaman kelaparan, maka dapat dinilai masyarakat tersebut memiliki ketahanan pangan yang stabil. Oleh karena itu, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi dimana setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi preferensi diet dan diperlukan untuk melindungi gaya hidup sehat. Ketahanan pangan menjadi hal fundamental dalam memastikan ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas pangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan Pangan Murah

Paturusi (2019) menyatakan bahwa program gerakan pangan murah atau disebut GPM merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional (2024) menjelaskan bahwa program GPM merupakan salah satu upaya yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna menyediakan ketersediaan pangan dan akses pangan yang diterapkan berbagai daerah baik kabupaten/kota. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menerapkan program GPM. Putri dkk. (2022) menyatakan bahwa pelaksanaan GPM memiliki peran strategis dalam memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat sehingga momentum program ini menjadi krusial di berbagai daerah. Dengan demikian, GPM juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan dan pengendalian inflasi, serta sebagai langkah antisipatif terhadap lonjakan permintaan dan konsumsi masyarakat. Program ini bertujuan untuk menekan angka inflasi, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga wajar, dan memastikan keseimbangan pasokan dan stabilisasi harga.

Definisi Konsepsional

Faktor penghambat program gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda adalah suatu identifikasi terhadap kendala yang menghambat proses implementasi program ketahanan pangan dalam rangka menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pokok tingkat daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian yaitu faktor penghambat program gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Adapun sumber data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dari informan yakni Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Koordinator Tim GPM, dan masyarakat penerima manfaat GPM. Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan GPM dan artikel yang kredibel berdasarkan relevansi topik penelitian. Pengumpulan data diterapkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik analisis data berdasarkan model interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat

Program Gerakan Pangan Murah merupakan sebuah agenda pemerintah nasional melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tingkat kota/kabupaten dalam mengatasi fluktuasi harga di tingkat konsumen dengan menyediakan harga yang terjangkau, dan menjamin tersedianya kebutuhan pangan bagi masyarakat. Program gerakan pangan murah (GPM) oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menghadapi berbagai kendala selama berlangsungnya program tersebut. Kendala yang dialami tersebut dipicu berdasarkan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses implementasi program GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda. Berikut ini hambatan-hambatan yang berpotensi menjadi penyebab ketidakefektifan dalam pelaksanaan program tersebut:

1. Ketergantungan komoditas yang disediakan oleh vendor mitra GPM

Faktor penghambat pertama adalah ketergantungan tinggi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh vendor mitra GPM. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda memiliki keterbatasan untuk secara mandiri menyediakan keseluruhan komoditas yang dibutuhkan dalam program GPM. Meskipun kemitraan ini memberikan efisiensi logistik, mitra GPM secara tidak langsung menciptakan sebuah kerentanan struktural yang signifikan. Ketergantungan ini menyebabkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda kehilangan kontrol penuh atas ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, terutama ketika vendor mitra mengalami keterbatasan stok atau kenaikan harga dari pemasok yang dituju. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menjelaskan bahwa kondisi tersebut menyoroti kelemahan pada segi sumber daya mengacu pada keterbatasan kapasitas internal memaksa organisasi pelaksana bergantung pada aktor eksternal.

Walaupun memiliki kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah dan swasta dalam mendukung berbagai pihak, namun hanya mengandalkan sumber daya yang tidak tetap atau permanen yang berasal dari organisasi pelaksana dapat menyebabkan adanya kesenjangan sumber daya secara signifikan. Tjilen (2019) menekankan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat, semakin besar pula potensi kegagalan. Program GPM menuntut stabilitas pasokan dan harga, namun ketergantungan pada pihak eksternal membuat organisasi pelaksana tidak

sepenuhnya mampu menjamin hasil tersebut. Situasi ini seringkali memaksa adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan program atau bahkan mengurangi volume distribusi, yang pada akhirnya membatasi konsistensi dan cakupan bantuan kepada masyarakat. Korten (dalam Andani dkk., 2019), kondisi yang dialami mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tuntutan program dengan kapasitas riil organisasi pelaksana. Hal ini melemahkan proses pelaksanaan program karena hasil program yang dimiliki belum memadai untuk memenuhi kebutuhan utama dari masyarakat secara masif.

2. Ketiadaan forum komunikasi antar pihak yang terlibat

Faktor penghambat kedua adalah tidak adanya forum komunikasi khusus yang berkelanjutan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Pola komunikasi yang terbangun cenderung bersifat reaktif dan berbasis momentum, di mana interaksi hanya aktif pada saat-saat mendesak atau menjelang pelaksanaan kegiatan di lapangan. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menjelaskan bahwa ketiadaan forum dialog yang terstruktur ini menghambat terbentuknya kognisi dan komitmen di antara para aktor. Pola pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda menunjukkan bahwa koordinasi lebih didorong oleh kebutuhan jangka pendek dan pemecahan masalah darurat daripada perencanaan strategis jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa tidak adanya forum koordinasi khusus yang permanen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Korten dalam (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa kapabilitas organisasi pelaksana dalam mengaktifkan hubungan antar pihak secara fleksibel mengacu pada sebuah praktik pengelolaan roda pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak yang berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama meskipun tanpa struktur formal yang kaku.

Di sisi lain, semakin banyaknya pihak yang terlibat tanpa menghadirkan suatu upaya dalam membangun ruang koordinasi yang bersifat tetap dapat berpotensi menghambat proses pelaksanaan program dalam mencapai keberhasilan program secara berkelanjutan (Putri dkk., 2022) Sebagaimana yang dikemukakan oleh Korten (dalam Andani dkk., 2019) menekankan bahwa ketiadaan forum komunikasi merupakan hambatan serius dalam proses pembelajaran sosial yang adaptif. Tanpa wadah tersebut, organisasi pelaksana dan para mitranya kehilangan kesempatan untuk secara kolektif merefleksikan pengalaman, mengantisipasi masalah, dan menyusun strategi bersama. Ansell dan Gash (dalam Tjilen, 2019) menyatakan bahwa kegagalan dalam membangun forum kolaboratif yang sistematis menghambat kemampuan untuk menciptakan nilai publik secara kolektif dan berkelanjutan Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dalam proses implementasi, di mana interaksi antar-pemangku kepentingan tidak terkelola secara optimal, sehingga menghambat sinergi dan kemampuan program untuk belajar dan beradaptasi secara berkelanjutan.

3. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Samarinda

Faktor penghambat ketiga yang krusial bagi masyarakat sebagai penerima manfaat adalah minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada agenda khusus yang dirancang untuk menyebarluaskan informasi program secara masif. Upaya sosialisasi yang ada sangat terbatas, hanya mengandalkan pemasangan spanduk di depan kantor dinas, undangan kepada OPD lain, serta komunikasi berjenjang melalui perwakilan kelurahan dan grup UMKM secara daring (dalam jaringan). Mekanisme ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas dan menciptakan kesenjangan informasi yang signifikan, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil atau yang tidak terhubung dengan jaringan komunikasi tersebut. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa minimnya informasi tersebut berpotensi menciptakan alienasi kebijakan, di mana penerima manfaat merasa tidak terhubung dengan program yang dirancang untuk membantunya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam sarana pengungkapan kebutuhan yang terletak pada kesenjangan penyebarluasan informasi. Dalam hal ini, upaya dinas menyebarkan informasi melalui saluran formal seperti spanduk dan kelurahan terbukti belum efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima manfaat tidak mengetahui adanya program GPM dari media, melainkan mengetahuinya secara kebetulan karena melihat langsung di lokasi. Adanya asimetri informasi ini menciptakan masalah serius yang mengakibatkan program tidak menjangkau seluruh target sasaran yang berhak, dan mekanisme umpan balik menjadi tidak optimal. Rayyan (2020) menjelaskan bahwa penyampaian layanan yang efektif memerlukan pendekatan yang berpusat pada pengguna, termasuk dalam strategi komunikasinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Korten (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa efektivitas sebuah program sangat bergantung pada strategi komunikasi yang inklusif. Sebuah program menjadi tidak relevan, apabila penerima manfaat yang tidak mengetahui keberadaannya. Kegagalan organisasi pelaksana dalam menarik penerima manfaat yang berhak mendapatkan manfaat secara langsung melemahkan tujuan utama program. Korten (dalam Andani dkk., 2019) menyatakan bahwa kendala tersebut merupakan kegagalan dalam membangun hubungan timbal balik yang sehat dengan komunitas sasaran.

Penutup **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat yang dihadapi, yaitu belum ketergantungan tinggi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada komoditas yang disediakan oleh

vendor mitra GPM yang berdampak pada kapasitas organisasi pelaksana dalam menjamin rantai pasok secara mandiri. Ketiadaan forum komunikasi yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat khususnya mitra GPM berimbang pada minimnya keterlibatan mitra GPM dalam proses perencanaan program GPM guna menjamin dukungan pasokan yang memadai dan bervariasi. Minimnya sosialisasi program kepada masyarakat luas mengacu pada partisipasi masyarakat yang rendah akibat ketidaktahuan program dan kurang menjangkau pelaksanaan program pada berbagai daerah Kota Samarinda sehingga menyebabkan kurang optimalnya implementasi program GPM guna menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penelitian mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda perlu beralih dari model ketergantungan pasif menjadi model manajemen rantai pasok yang proaktif dengan mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai pemasok utama yang langsung menyerap hasil panen dari petani lokal.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda perlu membentuk dan mengembangkan sebuah forum komunikasi multi-pemangku kepentingan yang bersifat formal dan periodik.
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda harus melakukan perencanaan strategi sosialisasi yang masif dan atraktif berbasis media sosial.

Daftar Pustaka

- Alaslan, A. (2021). *Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar*. Bandung: CV. Pena Persada.
- Albertus. (2022). Ketahanan Pangan Masyarakat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 03, 423–441. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- BPN. (2024). *Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023*. Badan Pangan Nasional.
- BPS. (2023). *Gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 0,12 persen. Kota Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,19 persen dan Kota Balikpapan mengalami inflasi sebesar 0,02 persen*. BPS Kaltim.
- BPS. (2024). Perkembangan Inflasi. *Badan Pusat Statistik*, April. <https://www.bps.go.id/id>
- Fauzi, M., Kastaman, R., & Pujianto, T. (2019). Pemetaan Ketahanan Pangan

- Pada Badan Koordinasi. *Industri Pertanian*, 01, 1–10. <http://www.iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/633/355>
- Fauzia, G., Elwamendri, E., Kurniasih, S., Ningsih, R., & Sativa, F. (2023). Advokasi Ketahanan Pangan di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.35912/jpu.v2i1.1862>
- Firdaus, G. S. (2020). *Evaluasi Daerah Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Menggunakan Metode Fuzzy C-Means (FCM) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*. 118. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/43606>
- Harnanda, W. (2020). *Implementasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru (Studi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2019)* [Universitas Islam Riau Pekanbaru]. <https://repository.uir.ac.id/15628/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/15628/1/187322039.pdf>
- Indarto, K. (2020). Effectiveness of Policy Implementation in Achievements of The Expected Food Pattern Score (Study in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan). *Journal of Public Administration Studies*, 5(2), 96–99. <http://www.jpas.ub.ac.id/index.php/jpas>
- Intoniswan. (2024). *Inflasi di Kaltim Tahun 2023 Relatif Terkendali Dibandingkan Tahun 2022*. Niaga Asia. <https://www.niaga.asia/inflasi-di-kaltim-tahun-2023-relatif-terkendali-dibandingkan-tahun-2022/>
- Paturusi, S. (2019). *Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda Gelar Bazar Murah, Catat Tanggal dan Lokasinya*. TribunKaltim. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/06/dinas-ketahanan-pangan-kota-samarinda-gelar-bazar-murah-catat-tanggal-dan-lokasinya?page=all>
- Putri, R. M., Kusdarini, K., & Putera, R. E. (2022). Implementasi Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Pada Masa Pandemi Covid-19. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 019–042. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4369>
- Rahmawati, L. (2020). Peran E-commerce dalam Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah Jakarta Saat The Role of E-commerce in Supporting Food Security in Jakarta Region During the Covid-19 Pandemic. *Magister Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada*, 8(2), 11–27.
- Ramadhan, A., Prawita, K., Izzudin, M. A., & Amandha, G. (2021). Analisis strategi dan klasterisasi ketahanan pangan nasional dalam menghadapi pandemi covid-19. *Teknologi Pangan : Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 12(1), 110–122. <https://doi.org/10.35891/tp.v12i1.2179>
- Rayyan, M. A. (2020). Analisis Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran pada Pengembangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(1), 63–76.

- Sari, R., Rianita, R., & Kartika, A. A. C. (2022). Analisis Potensi Usaha Ternak Domba Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Padang Bolak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 575–580.
- Septiana, A. R., Suprapto, Bormasa, M. F., Alaslan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, & Mosschananza, H. (2023). *Kebijakan Publik : Teori , Formulasi Dan Aplikasi*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Calpulis.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Sukabumi: Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2022). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyususan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Bumi Aksara.
- Yulianti, Y., Apriyanto, M., Azhar, A., & Fikri, K. N. S. (2023). Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 9(1), 16–24.
<https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i1.293>